

**KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI
ALAT BUKTI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
PENOLAKAN AUTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN**

SKRIPSI



OLEH :

RISZKI APRILIYANTO

NPM : 23300126

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI
ALAT BUKTI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
PENOLAKAN AUTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RISZKI APRILIYANTO

NPM : 23300126

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI
ALAT BUKTI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
PENOLAKAN AUTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

RISZKI APRILIYANTO

NPM : 23300126

Surabaya, 10 Juli 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI
ALAT BUKTI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
PENOLAKAN AUTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH :

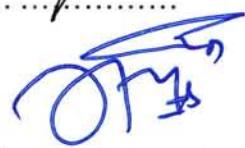
RISZKI APRILIYANTO

NPM : 23300126

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. (KETUA) 1.


2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.


3. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 3.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil ‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas segala limpahan rahmat, anugerah dan hidayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “*Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dan akibat hukumnya terhadap penolakan Autopsi oleh keluarga korban*”.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan harapan dari kedua orang tua Penulis tercinta, Ayah (Alm) Slamet Ariyanto dan Ibu (Almh) Suyati yang sangat memimpikan penulis untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi, Istri tercinta Nuryanti Sulis Setiyo Rini, ananda Anindhita Azhri Rahmadhani Putriyanti, ananda Adyasta Ammar Putrayanto dan Kakak Ipar Penulis H. Sulistiyo, S.H., M.H. serta semua keluarga yang telah memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan terima kasih atas segala dorongan, bantuan, semangat dan inspirasi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. SP.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta sebagai yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan dan juga selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar dalam membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi berkal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

4. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas bantuannya dan pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Komisaris Besar Polisi dr. Aris Sukarno, Sp.OG selaku Karumkit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso yang telah memberikan ijin belajar bagi penulis.
6. Ibu Pembina drg. Nanik Puji Wahyuni, M.M. selaku Kasubbagrenmin beserta staf Subbagrenmin yang telah membantu proses administrasi penulis dalam pengajuan ijin belajar.
7. Ibu Penata Tk.I Nor Handiah Rousita, S.E. selaku Kaurmin Subbagrenmin beserta staf Matlog yang telah memberikan motivasi dan semangat selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi.
8. Teman – teman se angkatan yang saling support satu sama yang lain, saling memotivasi dan telah bersama-sama dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Serta terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan doa dan semangat yang sangat berarti bagi penulis.
Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Surabaya, 16 Juli 2024

Hormat Renulis,

RISZKI APRILIYANTO

NPM : 23300126

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RISZKI APRILYANTO
NPM : 23300126
Alamat : Dukuh Kupang Gang Lebar No.12 Surabaya.
No. Telp. (HP) : 081233693996.

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : “*Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dan akibat Hukumnya terhadap penolakan Autopsi oleh keluarga korban*” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan,



RISZKI APRILYANTO

NPM : 23300126

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan semua aspek kehidupan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Keterlibatan penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana sangat penting untuk menetapkan secara sah terjadinya tindak pidana, menentukan urutan kejadian, mengidentifikasi motif di balik tindak pidana, dan mengidentifikasi alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. *Visum et Repertum* merupakan salah satu jenis alat bukti medis yang digunakan dalam proses peradilan di Indonesia. Penolakan terhadap prosedur autopsi oleh keluarga korban sering kali terjadi dan menjadi perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Penolakan autopsi oleh keluarga korban dapat menghambat proses penyelidikan dan pembuktian dalam kasus-kasus pidana yang kompleks. Implikasi hukum dari penolakan autopsi dapat mempengaruhi keberlanjutan proses hukum dan keadilan bagi semua pihak terkait. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kedudukan *Visum et Repertum* perlu diperkuat dengan mempertimbangkan kepentingan proses hukum dan kemanfaatan bagi kepentingan publik secara luas.

Metodologi yang digunakan adalah analisis normatif yang menggunakan pendekatan legislatif dan mengkaji kasus-kasus yang relevan. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder, khususnya penelitian pustaka yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, dan publikasi relevan lainnya. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana dan akibat hukum dari penolakan keluarga korban untuk melakukan otopsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki peran krusial sebagai bukti medis yang sah dalam proses hukum acara pidana. Meskipun demikian, beberapa langkah konkret telah diambil untuk memperbaiki implementasi hukum pidana dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga kepada para pemangku kepentingan terkait, seperti keluarga korban, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan *Visum et Repertum* di masa mendatang.

Kata Kunci : *Visum et Repertum*, Penolakan Autopsi, Korban Tindak Pidana.

ABSTRACT

Indonesia is a country of law that adheres to the principle of a state of law, which requires all levels of society to obey the laws and regulations in force in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The involvement of law enforcement officers in the investigation of a crime is very important to reveal the crime legally. The involvement of law enforcement officers in the investigation of a crime can help in determining whether a crime actually occurred, knowing the chronology of events, knowing the causes of the crime, and knowing the tools used to commit the crime. Visum et Repertum is a form of medical evidence used in legal processes in Indonesia. Rejection of autopsy procedures by victims' families often occurs and is a matter of debate in the Indonesian legal system. Refusal of an autopsy by the victim's family can hamper the investigation and evidentiary process in complex criminal cases. The legal implications of refusing an autopsy can affect the continuity of the legal process and justice for all parties involved. Therefore, legal protection for the position of Visum et Repertum needs to be strengthened by taking into account the interests of the legal process and benefits for the wider public interest..

The strategy used is a normative investigation using the legal framework and relevant case precedents. The data used comes from secondary sources, especially library research covering laws, court decisions, and other relevant publications. The purpose of this study is to analyze the role of Visum et Repertum as evidence in criminal procedure law, as well as the legal consequences of the victim's family's refusal to undergo an autopsy.

The results of the study indicate that Visum et Repertum plays an important role as legally valid medical evidence in the criminal procedure process. However, many specific steps have been implemented to improve criminal law enforcement in this regard. This study aims to provide valuable insights to relevant stakeholders, especially the victim's family, in improving the effectiveness of criminal law enforcement in cases requiring Visum et Repertum assessment in the future.

Keywords : Visum et Repertum, Refusal to Autopsy, Crime Victims

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
a. Secara Teoritis.....	9
b. Secara Praktis.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian	18
a. Tipologi Penelitian Dan Metode Pendekatan	18
b. Metode Pengumpulan Bahan Hukum / Data	19
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA	23
1. Prosedur Permohonan Visum et Repertum	23
2. Kedudukan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana	31
BAB III AKIBAT HUKUM APABILA TERDAPAT PENOLAKAN AUTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN	41
1. Akibat Penolakan Autopsi oleh Keluarga Korban.....	41

2. Akibat Hukum apabila terdapat Penolakan Autopsi oleh keluarga korban	46
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR BACAAN